

Yahya Staquf: Kiai Tak Dilarang Deklarasikan Dukungan Politik

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan, para kiai tidak dilarang untuk mendeklarasikan sikap dan dukungan politiknya jelang Pemilu 2024.

"Prinsipnya sebagai lembaga tidak ikut-ikutan, tapi kalau para kiai mau bersikap, ya, itu hak politik," kata Yahya selepas pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

Tetapi, Yahya menegaskan, dukungan tersebut tidak boleh mengatasnamakan NU atas nama lembaga.

Ia juga mengklarifikasi ucapan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, yang dalam kesempatan yang sama menyinggung akan adanya instruksi terhadap warga NU terkait Pemilu 2024.

"Sepertinya ada yang nanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh, yang kemudian disambut tawa

para hadirin. "Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," katanya melanjutkan.

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi. KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul. Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

● han

Eksepsi Rafael Alun Ditolak Hakim, Sidang Lanjut ke Tahap Pembuktian

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rafael Alun Trisambodo atas surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan ini merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan selama menjadi pejabat pajak.

"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Suparman Nyompa dalam sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/9).

Kubu Rafael Alun mengajukan nota keberatan yang pada pokoknya menolak dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Jaksa KPK juga telah menjawab keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum Rafael Alun Trisambodo.

Dari sejumlah keberatan yang disampaikan Rafael Alun, majelis hakim berpandangan ke-

beratan tersebut tidak dapat diterima lantaran tidak beralasan hukum. Di antaranya, soal posisi Rafael Alun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jika diduga melakukan pelanggaran atas kewajiban atau tugasnya maka terlebih dahulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta diuji dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat berwenang tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana.

"Bahwa hemat majelis hakim alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi keberatan berbeda ruang lingkupnya dengan tindak pidana korupsi yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaannya," kata hakim Suparman. ● mei

Usut Aliran Dana Lukas Enembe, KPK Periksa Pramugari RDG Airlines

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang Pramugari dari PT Rio De Gabriello (RDG) Airlines, Tamara Angraeny, sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Tamara Angraeny telah diperiksa pada Jumat (15/9), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Penyidik mendalami dugaan aliran sejumlah uang Lukas Enembe yang diubah bentuk menjadi aset bernilai ekonomis.

"Saksi hadir dan kembali dilakukan pendalaman materi pemeriksaan, antara lain dugaan aliran sejumlah

uang dari tersangka LE yang kemudian diubah bentuk menjadi aset yang bernilai ekonomis oleh beberapa pihak terkait lainnya," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (18/9).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Pramugari PT RDG Airlines bernama Selvi Punamasari pada Jumat (25/8) lalu sebagai saksi kasus TPPU Lukas Enembe. Didalam pengetahuan yang antara lain terkait dengan dugaan adanya pengantaran uang puluhan miliar secara tunai menggunakan pesawat jet," ujar Ali.

Adapun Selvi merupakan pramugari lepas di PT RDG, perusahaan penyewaan jet pribadi yang kerap dipakai Lukas Enembe. Kemudian, KPK menduga Lukas Enembe memerintahkan Direktur PT Rio De Gabriello (RDG) Gabriel Isaak membawa uang tunai miliaran rupiah ke luar negeri menggunakan pesawat jet.

PT RDG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan pesawat jet pribadi. Oleh karenanya, KPK memeriksa Gabriel Isaak sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU Lukas Enembe. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KULIAH KEBANGSAAN GANJAR PRANOWO DI UNIVERSITAS INDONESIA
Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Ganjar Pranowo (tengah depan) menyapa dan berfoto dengan mahasiswa usai mengisi Kuliah Kebangsaan di Fisip Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9). Kuliah Kebangsaan Fisip UI tersebut mengambil tema 'Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan'.

Presiden Jokowi Sebut NU Memiliki Kekuatan yang Sangat Luar Biasa

Jokowi meminta NU tingkatkan kualitas tidak hanya bidang sosial, keagamaan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Menurutnya, perlu konsolidasi dan organisasi yang baik dalam mengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Kepala Negara mengatakan hal tersebut saat memberikan kata sambutan di acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU), di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Senin (18/9) pagi.

"Kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar.

Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi. Perlu diorganisasi dengan baik," kata Jokowi.

Ia meminta NU agar terus meningkatkan kualitasnya tidak hanya pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan saja. Tetapi, katanya, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia profesional, di dunia kewirausahaan.

"Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekuatan NU baik yang ada di dalam

negeri, maupun yang berada di luar negeri," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari bahwa kondisi warga nahdiyyin di akar rumput perlu didukung. Pemerintah, katanya, menyambut baik inisiatif PBNU membentuk gerakan keluarga maslahat (GKM) NU. Menurutnya gerakan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia terutama untuk para nahdiyyin di level akar rumput.

"Namun selain itu banyak sekali juga nahdiyyin muda yang bermain di level global. Yang sedang kuliah di luar negeri banyak. Yang sedang belajar ilmu pengetahuan baru banyak, belajar teknologi baru banyak, belajar artificial intelligence banyak, belajar precision medicine banyak dan belajar dunia masa depan banyak dan ilmu masa depan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim, tanpa

kehilangan jati dirinya sebagai nahdiyyin," kata Jokowi.

"Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyoal masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan ummat di akar rumput, mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdiyyin di akar rumput dan mensejahterakan umat," katanya.

Selain itu, Jokowi juga mendukung inisiatif Ketua Umum PBNU KH Yahya

Staquf dalam melakukan digitalisasi. Selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, kata Jokowi, digitalisasi juga akan menghubungkan para nahdiyyin di seluruh dunia.

"Saling berbagi komitmen, saling bekerja sama, bersama meningkatkan kualitas diri, bersama sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat," ujarnya menandatangani. ● han

SOAL KONFLIK DI PULAU REMPANG Cak Imin: Investasi Tak Boleh Merugikan Masyarakat Setempat

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang dijagokan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) oleh Koalisi Perubahan, ikut menyoroti bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut Cak Imin --panggilan Muhaimin Iskandar-- persoalan tersebut tidak boleh terulang. Cak Imin mengatakan, tidak boleh ada investasi yang merugikan masyarakat setempat.

"Ya Rempang ini pelajaran yang tidak perlu terulangnya. Investasi harus disiapkan dengan kesadaran masyarakat secara bersama-sama. Tidak boleh investasi merugikan masyarakat setempat," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/9).

Cak Imin menegaskan bahwa investasi itu harus memberikan berkah dan man-

faat kepada masyarakat. Realisasi investasi haruslah dialogis.

"Sama-sama mendukung dari proses sosialisasi, diskusi dan pendekatan yang baik. Saya kira saatnya pemerintah mengedepankan dialog daripada represif," katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, persoalan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menuai sorotan publik lantaran memicu bentrokan antara warga dengan aparat keamanan. Pada Senin (11/9) lalu, ribuan warga menggeruduk Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga terjadi kerusuhan.

Kerusuhan di Pulau Rempang ini terjadi setelah warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut. Lantaran, gara-gara proyek itu, penduduk Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa harus direlokasi. ● mei

Ganjar Pranowo: Saya Kader Partai, Tapi Presiden dan Gubernur Bukan ...

DEPOK (IM) - Bakal calon presiden (capres) dari PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya adalah kader partai. Tetapi, saat kader partai mendukung jabatan publik, termasuk presiden dan gubernur, fokusnya adalah melayani rakyat.

Ganjar menyampaikan hal iniketa menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai statusnya sebagai kader partai atau pelayan publik saat menghadiri Kuliah Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan tema 'Hendak ke Mana Indonesia Kita' di Depok, Senin (18/9).

"Saya kader partai. Tapi, presiden bukan (kader partai). Gubernur, bukan (kader partai). Itulah melayani," kata Ganjar.

Ganjar lalu mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dalam menangani beberapa

kasus, ia mengaku berpihak kepada masyarakat, bukan kepada partai.

Ia mengatakan, perjalanannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah bisa dilihat dan bisa dicari guna memastikan posisinya sebagai kader partai atau pelayan masyarakat.

"Jadi kita bisa membedakan, ketika kita sudah berada dalam catatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya?" tanya Ganjar.

"Mungkin nyaris Anda tidak menemukan itu. Lihat 10 tahun (saat) saya (menjabat). Itu bukan waktu pendek, dan 10 tahun artinya saya terpilih dua kali," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Ganjar meminta calon pemilihnya untuk meriset terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Menurutnya, riset perlu di-

lakukan ketika masyarakat akan memilih sosok calon pemimpin.

"Siapa yang mau kamu pilih, tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa pilih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin enggak dengan saya," kata Ganjar.

Pernyataan Ganjar ini beda dengan pernyataan para elit PDI-P selama ini. Mereka selalu mengatakan bahwa kadernya yang menjabat sebagai eksekutif, baik itu wali kota, bupati, gubernur, dan bahkan presiden, mereka sebut sebagai petugas partai.

Diketahui, Ganjar merupakan bakal capres PDI-P yang dideklarasikan pada April 2023. Hingga kini, pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua partai politik nonParlemen, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura. ● han



RDPU RUU IKN DPR DAN AKADEMISI

Peneliti sekaligus dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Gabriel Lele (kanan) bersama akademisi Universitas Brawijaya Profesor Imam Kuswahyono (tengah) dan pakar sosiologi Muhammad Adriansyah (kiri) menyampaikan pandangannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). Rapat tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dari para akademisi terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Nusantara (IKN).

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini:
PT Rasuna Kinarya Tama, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta ("Perseroan"), mengumumkan sehubungan dengan rencana perubahan pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya mengakibatkan adanya perubahan pengendalian dalam Perseroan dan disertai dengan adanya perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan.
Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.
Jakarta, 19 September 2023
Direksi
PT Rasuna Kinarya Tama